



**LAPORAN
VERIFIKASI INDEKS KAMI**

**Instansi/Perusahaan:**

**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Narasumber Instansi/Perusahaan:

1. Tiomaida Seviana HH., S.H., M.A.P.
19700915 199603 2 001
2. Hermin Wijaya, ST, M.Kom.
19730916 199803 2 002
3. Mumul Mulyadi, S.T.
19800515 201001 1 004
4. Waseso Wibisono, S.Kom.
19900531 201503 1 003
5. Hannif Izzatul Islam
6. Sandy Herdiansyah

Unit Kerja:

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Alamat:

Jl. Taman Sari Nomor 55, Bandung

Email:

bid.pkami@jabarprov.go.id

Tel: 022 2502898

Fax:

Pimpinan Unit Kerja:

Setiaji, ST, M.Si
19740608 199803 1 003

A. Ruang Lingkup:**1. Instansi / Unit Kerja:**

Layanan Infrastruktur (Data Center, NOC, SOC, Jaringan, Server, UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial) dan Sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat).

2. Fungsi Kerja:

Merencanakan, mengoperasikan, mengelola, menganalisa, memelihara dan mengimplementasikan sistem informasi di Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat termasuk di dalamnya aplikasi dan database, jaringan, kebijakan, keamanan, dan risiko Teknologi Informasi serta menjamin kualitas layanan TIK agar sesuai dengan standar nasional dan internasional.

3. Lokasi:

No.	Nama Lokasi	
1.	Diskominfo Pemprov Jabar	Jl. Taman Sari No 55 Bandung
2.	Data Center	Jl. Taman Sari No 55 Bandung
3.	UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

B. Nama/Jenis Layanan Publik:

- a. MCAP (*Mobile Community Access Point*)
- b. Layanan wifi area publik
- c. Ruang layanan internet publik
- d. Layanan informasi website jabarprov.go.id
- e. Layanan aduan masyarakat

C. Aset TI yang kritis:

1. Informasi :

- Data Pribadi Masyarakat;
- Data Pegawai;
- Data Keuangan;
- Data Jaringan Komunikasi;
- Data Konfigurasi Sistem;

2. Aplikasi:

Total aplikasi sebanyak 320 aplikasi, beberapa aplikasi tersebut antara lain:

- siap.jabarprov.go.id,
- kinerja.jabarprov.go.id
- pikobar.jabarprov.go.id
- E-office
- RKPD Online
- E-monev
- SIPKD
- SKP
- Aplikasi Perijinan
- Website Jabarprov.go.id
- Website Diskominfo
- E-SAKIP
- ATISIBADA

3. Server:

- server siap.jabarprov.go.id,
- server kinerja.jabarprov.go.id
- server pikobar.jabarprov.go.id
- server e-Office
- server RKPD Online
- server e-Monev
- server SIPKD
- server SKP
- server Perijinan
- server website jabarprov.go.id
- server e-SAKIP

4. Infrastruktur Jaringan/*Network*:

- Lintasarta (utama), ICON+ (redundan dan DRC), dan Moratel (cadangan).

D. DATA CENTER (DC):

(*Beri keterangan apakah ruang Data Center terpisah dengan perimeter/pembatas, memiliki pengamanan fisik dan sarana pendukung, dsb*)

ADA, dalam ruangan khusus

ADA, jadi satu dengan ruang kerja

E. DISASTER RECOVERY CENTER (DRC):

(Jika ada, jelaskan kondisi DRC: colocation di pihak ketiga atau di instansi lain termasuk pengelolaan keamanan DRC)

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| X ADA | <input type="checkbox"/> Dikelola Internal | X Dikelola vendor : ICON+ |
| <input type="checkbox"/> TIDAK ADA | | |

**Status Ketersediaan Dokumen Kerangka Kerja
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**

No.	Nama Dokumen	Ya	Tdk	Keterangan (D: Draf, R: Rilis, T: Tersosialisasikan)
	Kebijakan, Sasaran, Rencana, Standar			
1	Kebijakan Keamanan Informasi (ref. kebijakan yang disyaratkan ISO 27001)	Ya		R
2	Syarat & Ketentuan Penggunaan Sumber Daya TI (Email, Internet, Aplikasi)	Ya		R
3	Sasaran TI / Keamanan Informasi	Ya		R
4	Organisasi TI / Keamanan Informasi (IT Steering Committee, Fungsi Keamanan TI)	Ya		R
5	Metodologi Manajemen Risiko TI	Ya		R
6	<i>Business Continuity Plan</i>	Ya		R
7	Klasifikasi Informasi	Ya		R
8	Standar software dekstop	Ya		R
9	Metode Pengukuran Efektivitas Kontrol	Ya		R
10	Non Disclosure Agreement (NDA)	Ya		R
	Prosedur- Prosedur:			
1	Pengendalian Dokumen	Ya		R
2	Pengendalian Rekaman/Catatan	Ya		R
3	Tindakan Perbaikan & Pencegahan	Ya		R
4	Audit Internal	Ya		R
5	Penanganan (<i>Handling</i>) Informasi: pelabelan, penyimpanan, pertukaran, penghancuran	Ya		R
6	Pengelolaan Media Removable & Disposal	Ya		R
7	Pengelolaan Perubahan Sistem TI (<i>Change Control</i> Sistem TI)	Ya		R
8	Pengelolaan Hak Akses (<i>User Access Management</i>)	Ya		R
9	Teleworking (Akses Remote)	Ya		R
10	Pengelolaan & Pelaporan Gangguan / Insiden Keamanan Informasi	Ya		R

No.	Nama Dokumen	Ya	Tdk	Keterangan (D: Draf, R: Rilis, T: Tersosialisasikan)
11	Pemantauan Sumber Daya TI: a. Monitoring Kapasitas b. Log Penggunaan User	Ya		R
12	Instalasi & Pengendalian Software	Ya		R
13	Back-up & restore (prosedur/jadwal)	Ya		R

Tabel 1. Ceklist Ketersediaan Dokumen SMKI (Indeks KAMI)**Dokumen yang diperiksa:**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Nomor 049/Kep.2031/Diskominfo tentang Administrator Jaringan Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
9. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 023/SD.02.03.02/P.KAMI tentang Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A. 2019
10. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sd Tahun 2023
11. *Road Map* Bidang Persandian Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika JABAR 2020 sd 2030
12. K01/SMKI Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Revisi 2.0
13. K02/SMKI Kebijakan Kerangka Kerja (*Framework*) Manajemen Risiko Keamanan Informasi Revisi 1.0
14. K03/SMKI Kebijakan Ruang Lingkup Sertifikasi ISO 27001 dan *Statement Of Applicability* (SOA) Revisi 2.0
15. K04/SMKI Kebijakan Kelangsungan Layanan Data Center Revisi 1.0
16. K05/SMKI Kebijakan Peran dan Tanggung Jawab Keamanan Informasi
17. K06/SMKI Kebijakan Standar Kompetensi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
18. K07/SMKI Kebijakan Penggunaan Perangkat TI Milik Pihak Ketiga
19. K08/SMKI Kebijakan Perlindungan Data Pribadi
20. PR-01/SMKI Prosedur Pengendalian Dokumen
21. PR-02/SMKI Prosedur Pengendalian Rekaman
22. PR-03/SMKI Prosedur Audit Internal
23. PR-04/SMKI Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal
24. PR-05/SMKI Prosedur Manajemen Review
25. PR-06/SMKI Prosedur Tindakan Perbaikan dan Improvement
26. PR-07/SMKI Prosedur Monitoring dan Evaluasi Vendor

27. PR-08/SMKI Prosedur Pengelolaan dan Penghancuran *Removable Media*
28. PR-09/SMKI Prosedur Penanganan Pelabelan dan Pertukaran Informasi (termasuk disposal)
29. PR-10/SMKI Prosedur Pengendalian Perubahan TI
30. PR-11/SMKI Prosedur Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi
31. PR-12/SMKI Prosedur Instalasi dan Kepatuhan Lisensi Software
32. SOP-01/SMKI SOP *Back up* dan Restore
33. SOP-02/SMKI SOP Penempatan (*Colocation*) Server
34. SOP-03/SMKI SOP Pemberian Hak Akses Pengunjung Data Center
35. SOP-04/SMKI SOP Monitoring dan Pemeliharaan Data Center
36. SOP-05/SMKI SOP Hosting Aplikasi dan Web
37. SOP-06/SMKI SOP Pengunggahan Konten dan Rilis
38. SOP-07/SMKI SOP Penerbitan Sub Domain
39. SOP-08/SMKI SOP Pemeriksaan Rutin Suhu Ruang Server
40. SOP-09/SMKI SOP *Raised Floor* Ruang Server, NOC, dan Ruang Telco
41. SOP-10/SMKI SOP Pemeriksaan Kabel Perangkat Data Center dan Jaringan Komunikasi
42. SOP-11/SMKI SOP Penanganan Permasalahan Jaringan Komunikasi Data
43. SOP-12/SMKI SOP Layanan *Video Conference*
44. SOP-13/SMKI SOP Monitoring dan Pemeliharaan CCTV
45. SOP-14/SMKI SOP Pemeriksaan Jaringan LAN Diskominfo
46. SOP-15/SMKI SOP *Alarm Fire*
47. SOP-16/SMKI SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi JABARPROV-CSIRT

Bukti-bukti (rekaman/arsip) penerapan SMKI:

48. Sertifikat ISO 2013:27001
49. Hasil Audit Internal ISO 27001 Tahun 2019
50. DPA Diskominfo Pemprov Jabar
51. Form Temuan Audit Internal
52. Laporan Pelatihan CEH
53. Laporan bulanan Pengelolaan JSOC
54. Laporan Insiden Siber ke BSSN
55. Nota Dinas ke Bidang lain terkait penambahan Persyaratan Keamanan Informasi pada SPK
56. Daftar Induk Dokumen
57. Dokumentasi Jaringan
58. Daftar aset (informasi, *software*, infrastruktur *hardware & network*, fasilitas dan sarana pendukung serta SDM & pihak ketiga)
59. *Risk Register* Diskominfo dan RTP
60. Risalah Rapat Tinjauan Manajemen (*Management Review*)
61. UAT Konfigurasi Splunk
62. SPK Kontrak Vendor
63. Beberapa draf Peraturan Gubernur yang sedang dalam proses penyusunan

Pemeriksaan Fisik di Lapangan:

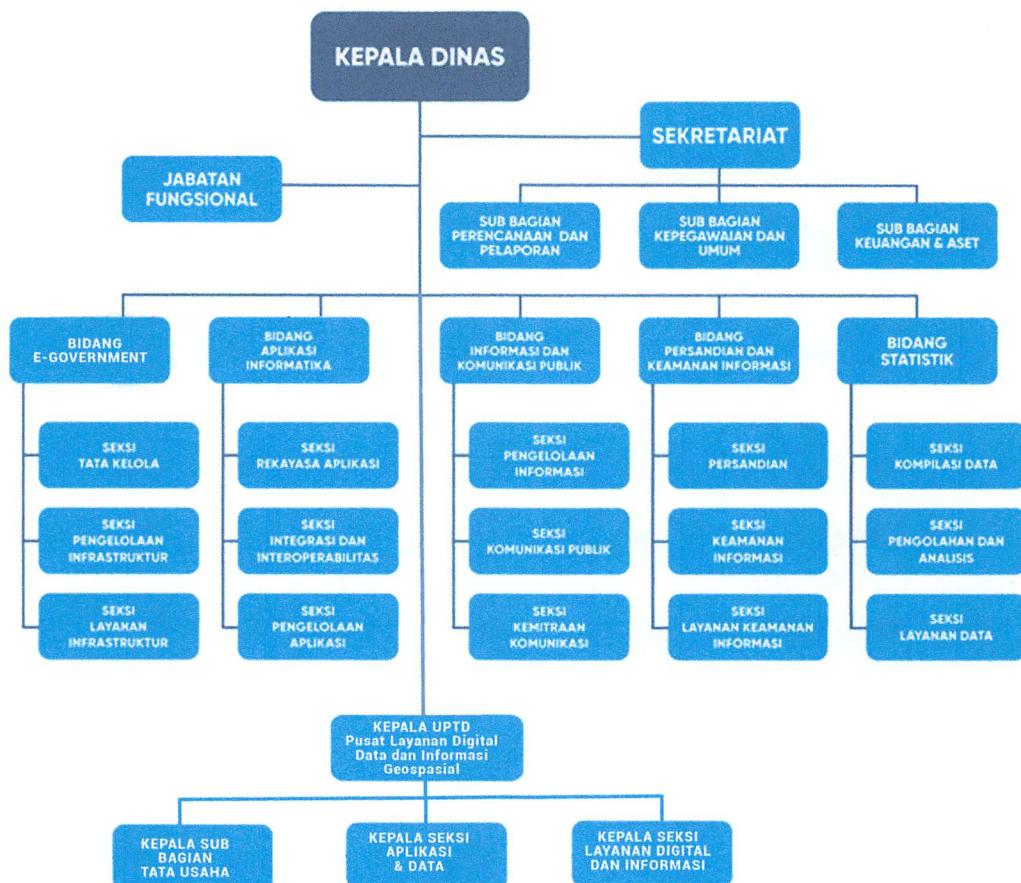
64. Ruang Server dan SOC

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen, pemeriksaan fisik dan wawancara terhadap narasumber instansi/perusahaan disimpulkan sebagai berikut:

I. KONDISI UMUM:

Struktur Organisasi

Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat mengalami perubahan struktur organisasi tahun 2019, dengan adanya pemisahan penambahan UPT yaitu Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial. Pada tahun 2018 mengalami perubahan struktur organisasi lagi dengan adanya penambahan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Adapun struktur Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat yang baru adalah sebagai berikut:



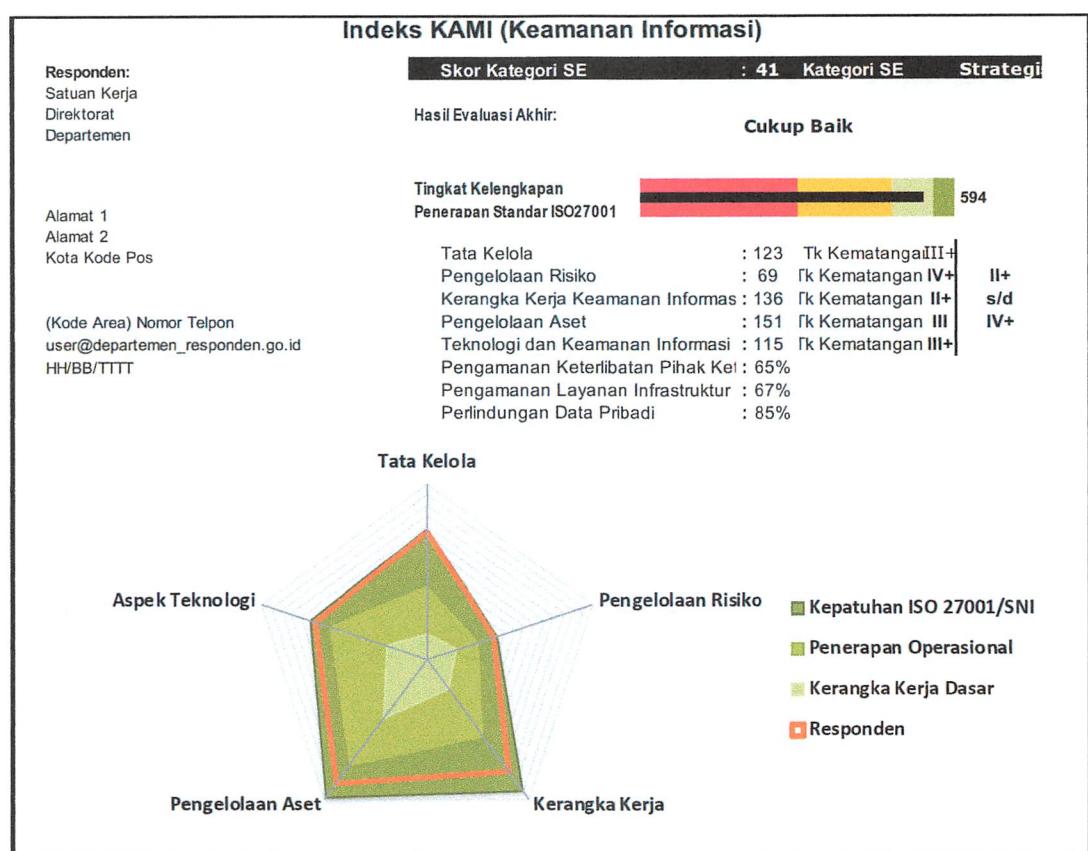
Jumlah pegawai di Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat adalah 82 personil ASN, dan 172 personil Non ASN (dengan 63 personil merupakan personil terkait TI). Sedangkan jumlah pegawai di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebanyak 12 personil ASN/Non ASN.

Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan program keamanan informasi sesuai Peraturan Menteri Kominfo nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI).

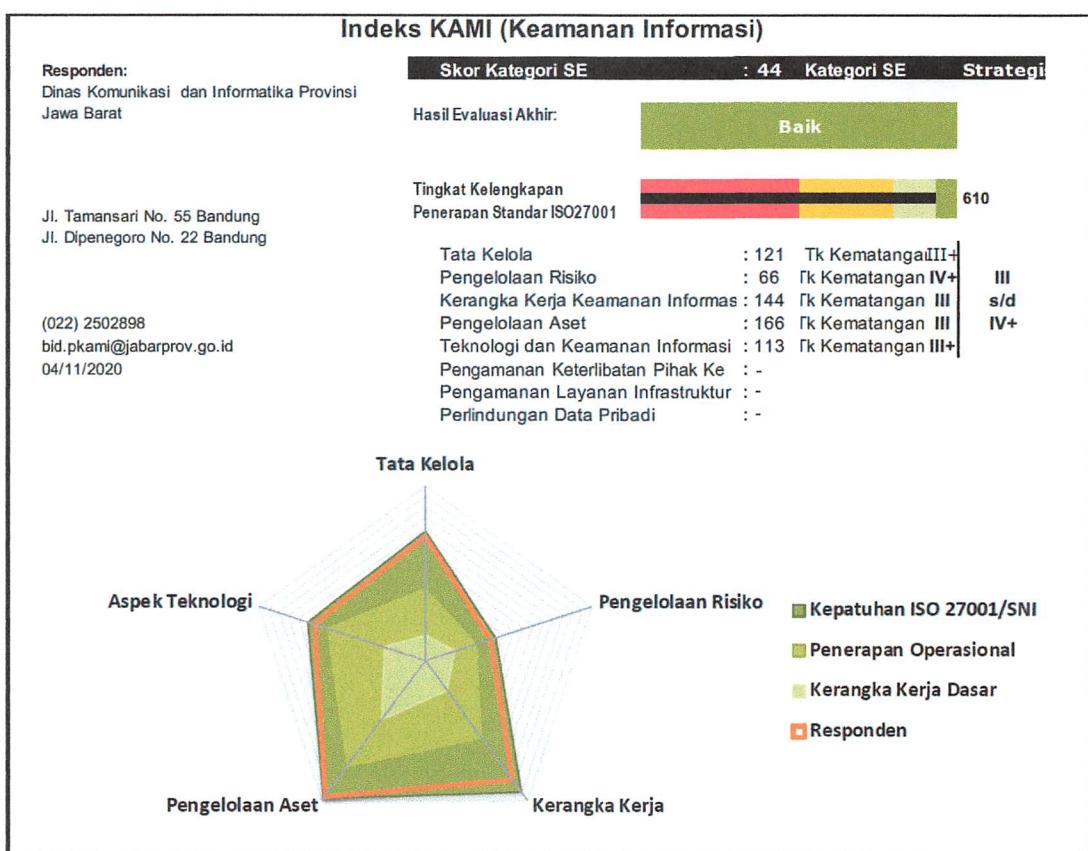
Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat telah mendapatkan Sertifikasi ISO 27001:2013 pada tahun 2018 dengan ruang lingkup pengamanan fisik dan lingkungan Data Center. Untuk tahun 2020 ini Penilaian Mandiri indeks KAMI dilakukan dengan ruang lingkup Layanan Infrastruktur (Data Center, NOC, SOC, Jaringan, Server, UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial) dan Sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat dengan kategori **STRATEGIS** dan hasil evaluasi akhir **CUKUP BAIK** dengan total nilai 594.

Pada tahun 2020, pemeriksaan terhadap Penilaian Mandiri yang memfokuskan pada kriteria-kriteria yang perlu dilakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan atas Penilaian Mandiri tahun 2019.

Total nilai Penilaian Mandiri: 594 (ref. file Indeks KAMI sebelum pemeriksaan)



Total nilai hasil pemeriksaan atas Penilaian Mandiri: 610 (ref. file Indeks KAMI pasca pemeriksaan)



II. ASPEK TATA KELOLA:**a. Temuan**

1. Kompetensi untuk jabatan struktural sudah dituliskan dalam Kebijakan Standar Kompetensi Sistem Manajemen Keamanan Informasi, namun kompetensi untuk jabatan pelaksana keamanan informasi misalnya anggota SOC belum tersedia.
2. Data rekapitulasi/matriks keseluruhan pemenuhan kompetensi teknis bagi pelaksana keamanan informasi terhadap persyaratan kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada Kebijakan Standar Kompetensi Sistem Manajemen Keamanan Informasi belum ditemukan.
3. Sudah mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan tetapi belum melakukan pemetaan mana yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata) atau yang dapat di selesaikan secara internal.

b. Rekomendasi

1. Melengkapi kompetensi untuk jabatan pelaksana keamanan informasi sebagai bagian dari dokumen Kebijakan Standar Kompetensi Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
2. Membuat data rekapitulasi/matriks keseluruhan pemenuhan kompetensi teknis bagi pelaksana keamanan informasi.
3. Melakukan pemetaan insiden keamanan informasi yang termasuk pada pelanggaran hukum (pidana dan perdata) atau yang dapat di selesaikan secara internal organisasi untuk dimasukkan dalam Kebijakan SMKI Diskominfo Pemprov Jabar. Dalam penyusunan peta insiden tersebut dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. ASPEK RISIKO:**a. Temuan**

1. Review terhadap kerangka kerja pengelolaan risiko sudah dilakukan namun masih ditemukan kekurangan pada daftar risiko/*risk register*, sebagai berikut:
 - terdapat aset (informasi, *software*, infrastruktur *hardware & network*, fasilitas dan sarana pendukung serta SDM & pihak ketiga) pada Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat yang tidak tercatat daftar risiko;
 - ditemukan beberapa aset beserta profil risiko tahun sebelumnya dalam daftar risiko 2020;
 - belum ditemukan pemberian prioritas atas perlakuan risiko.
2. Belum ditemukan bukti bahwa pengelolaan risiko sudah menjadi bagian penilaian kinerja pengamanan.

b. Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk poin temuan 1 pada Aspek Risiko:
 - Memperbaiki daftar risiko dengan mengumpulkan seluruh aset yang dimiliki setiap bidang dan sekretariat pada Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat dengan di-*lead* oleh Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, khususnya Seksi Keamanan Informasi yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.
 - Membuat laporan evaluasi atas perlakuan risiko/*risk treatmen* yang diputuskan untuk dilakukan. Adapun laporan evaluasi tersebut dapat menunjukkan efektivitas dari perlakuan risiko yang dipilih terhadap risiko yang dituju.
2. Menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian dari kriteria proses penilaian kinerja pengamanan yang dapat ditunjukkan dengan pemenuhan *risk treatment plan* yang menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pegawai atau organisasi.

IV. ASPEK KERANGKA KERJA:**a. Temuan**

1. Komposisi tim pemulihan bencana sudah dibentuk melalui Kebijakan Kelangsungan Layanan Data Center namun belum mendefinisikan peran, wewenang dan tanggung jawab.
2. Uji coba kelangsungan layanan TI sudah diajukan untuk dijadwalkan namun pada saat pemeriksaan, jadwal tersebut masih dalam proses persetujuan.

b. Rekomendasi

1. Mendefinisikan peran, wewenang dan tanggung jawab tim pemulihan bencana dan mengubah Kebijakan Kelangsungan Layanan Data Center dengan penambahan ini.
2. Melaksanakan uji coba kelangsungan layanan TI sesuai dengan jadwal.

V. ASPEK PENGELOLAAN ASET**a. Temuan**

1. Sudah terdapat kebijakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Pasal 27 Pergub Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE dan sudah terdapat draf Keputusan Gubernur Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun belum terdapat daftar data dan informasi yang dilengkapi dengan penanggung jawab dan klasifikasi.
2. Sudah terdapat kebijakan untuk *user* yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/outsource yang habis masa kerjanya pada Kebijakan SMKI Dinas Kominfo Bab Keamanan Sumber Daya Manusia dan *Form* Permintaan/Penutupan Hak Akses, namun belum terdapat prosedur untuk melakukan penutupan hak akses.

b. Rekomendasi

1. Membuat daftar data dan informasi yang dilengkapi dengan penanggung jawab, klasifikasi dan tingkat akses.
2. Membuat prosedur penutupan hak akses untuk *user* yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/outsource yang habis masa kerjanya.

VI. ASPEK TEKNOLOGI**a. Rekomendasi**

1. Terdapat sistem yang baru diterapkan pada tahun 2020 sehingga kepatuhan atas penerapan konfigurasi standar belum dapat dilakukan.
2. Aset informasi sudah diamankan dengan menggunakan tanda tangan elektronik hal tersebut dibuktikan dengan sudah dimilikinya tanda tangan elektronik oleh semua pegawai di Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat namun pengamanan dengan menerapkan enkripsi file belum dilakukan untuk aset informasi penting.
3. Belum semua sistem dan aplikasi sudah mendukung penggantian password secara otomatis.
4. Belum semua perangkat desktop dan server sudah dimutakhirkan dengan versi terkini.
5. Telah terdapat definisi dan metodologi *Software Development Life Cycle* dalam Pergub Jabar Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata kelola SPBE. Namun dalam proses pembangunan aplikasi yang baru maupun *existing*, fungsi keamanan dalam salah satu tahapan pembangunan belum dapat dibuktikan.

b. Rekomendasi

1. Menyusun jadwal pengujian kepatuhan penerapan konfigurasi dan melaksanakan jadwal tersebut.
2. Menggunakan tambahan enkripsi file untuk aset informasi penting pada Dinas Kominfo Pemprov Jawa Barat.

Bandung, 6 November 2020

Narasumber Instansi/Perusahaan:

1. Tiomaida Seviana HH., S.H., M.A.P.
19700915 199603 2 001

2. Hermin Wijaya, ST, M.Kom.
19730916 199803 2 002

3. Mumul Mulyadi, S.T.
19800515 201001 1 004

4. Waseso Wibisono, S.Kom.
19900531 201503 1 003

5. Hannif Izzatul Islam

6. Sandy Herdiansyah

Asesor Indeks KAMI:

1. Asesor Utama:
Fajarudin Setio Utomo, S.ST., M.AP.

2. Asesor Pendamping:
Vira Septiyana Kasma, S.ST.

Mengetahui,
Supervisor:

Danang Jaya, S.Si., M.Kom.